

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti di bab 5 yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, maka peneliti mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini, bahwa bentuk partisipasi sangat mempengaruhi kepada proses perumusan kebijakan, keberhasilan suatu kebijakan berkaitan erat dengan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu berupa musrenbang, konsultasi publik, *focus group discussion* dan kegiatan ini memang harus diikuti oleh masyarakat terutama yang terkena dampak, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

Dalam perumusan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) di Kota Bukittinggi khususnya mengenai RTH belum sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dari data-data yang peneliti temukan dilapangan bahwa lemahnya kemauan politik pemerintah ini adanya sikap dari pemerintah yang lebih tau yang terbaik untuk masyarakatnya, yang terjadi di Kelurahan Bukit Apit dibuktikan dengan tidak adanya musrenbang mengenai penetapan RTH di Kelurahan tersebut dan pemerintah menentukan luas RTH tersebut dari batas-batas wilayah yang terdapat pada peta. Selanjutnya mengenai dominasi elit lokal memang sudah jelas-jelas terlihat karena RTH tersebut akan dibuat tempat wisata oleh para pengusaha di Kota Bukittinggi hal ini merupakan salah satu alasan kuat masyarakat menolak adanya RTH.

Begitupun dari lembaga kemasyarakatan memang tidak dilibatkan dari awal perencanaan RTH, mereka mengetahui luas RTH setelah Perda di publikasikan, hal ini terjadi bukan karena lemahnya lembaga kemasyarakatan tapi memang dari pemerintah Kota Bukittinggi mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan ataupun niniak mamak terlibat dalam penentuan luas lahan, kenyataannya hal tersebut tidak ada. Selanjutnya mengenai bentuk partisipasi masyarakat sudah tergolong baik karena masyarakat melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD hal tersebut merupakan salah satu bentuk dari kesadaran partisipasi masyarakat.

Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bukit Apit dalam penentuan RTH ini dengan mengikuti rapat yang diadakan pemerintah, rapat tersebut tidak langsung dihadiri oleh masyarakat yang terkena dampak tetapi diwakili oleh datuak dan niniak mamak kepala kaum dan mereka yang akan melanjutkan informasi atau hasil dari rapat kepada kaum.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai analisis alasan masyarakat Bukit Apit menolak lahan ruang terbuka hijau, maka dengan ini peneliti membuat saran atau rekomendasi sehingga untuk peneliti berikutnya menjadi lebih jelas lagi dalam mengkaji penolakan terhadap Peraturan Daerah :

6.2.1 Saran Teoritis

Penelitian mengenai penolakan terhadap ruang terbuka hijau merupakan kajian yang menarik untuk diteliti, karena di satu sisi pemerintah mempunyai tujuan yang jelas mengenai pembentukan ruang terbuka hijau, dan di sisi lainnya masyarakat akan memanfaatkan lahan sebagai perumahan terlebih lagi jumlah penduduk semakin meningkat.

Sehingga ada dua tujuan yang berbeda antara masyarakat dan pemerintah. Pembentukan ruang terbuka hijau memang harus ada kejelasan baik berupa perjanjian tertulis dengan pemilik lahan atau kesepakatan yang memang benar-benar dengan orang yang akan terkena dampak dari suatu kebijakan.

Maka sebagai saran penelitian lanjutan dalam penelitian ini, sebaiknya dilihat bagaimana komunikasi atau dialog antara pemerintah dengan pemilik lahan dan bagaimana kelengkapan data data mengenai lahan masyarakat serta kesiapan dari pemerintah maupun masyarakat dalam membentuk RTH agar kebijakan yang dibuat tersebut tidak hanya tinggal aturan yang tertulis tanpa adanya keberlanjutan sanksi bagi yang melanggar.

6.2.2 Saran Praktis

Saran praktis, bagi para pembuat kebijakan agar mengikuti semua proses pembentukan kebijakan dengan tujuan mengurangi kegagalan dalam produk kebijakan. Dan untuk lembaga kemasyarakatan dan masyarakat yang nantinya akan terkena dampak sebuah kebijakan harus turut andil dalam mempengaruhi kebijakan, tidak hanya diwakilkan oleh tokoh masyarakat.